

Desentralisasi atau Separasi? Suatu Pandangan dari Sulawesi Selatan.

Elizabeth Morrell, PhD
University of New England, Armidale, NSW, Australia

Makalah untuk Panel 'Konflik sekitar proses devolusi kekuasaan ekonomi dan politik'.

Seminar Simposium dan Lokakarya Internasional II
Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru

18-21 Juli 2000

Universitas Andalas
Kampus Limau Manis
Padang - Sumatera Barat

DRAFT ONLY -

Peluang untuk merubah struktur dan bentuk pemerintahan lokal yang terjadi di era reformasi ini akan mempengaruhi masa depan Indonesia di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Apalagi pengaruh dari perubahan lokal ini tidak hanya akan terasa di daerah saja, tetapi bisa juga menjangkau sampai ke tingkat nasional dan global. Perubahan yang akan saya bicarakan dalam makalah ini adalah kemunculan gerakan-gerakan pembentukan provinsi baru, khususnya di Sulawesi Selatan. Wilayah itu sedang terancam pemisahan menjadi tiga atau empat provinsi dalam batasan wilayah provinsi induk. Mengapa banyak daerah ingin berpisah, dan bagaimana caranya? Bagaimana dampaknya bagi provinsi dan penduduk Sulawesi Selatan? Apakah terbentuknya provinsi yang baru akan menguntungkan wilayahnya, atau memunculkan persoalan baru?

Pakar politik Andi Mallarangeng menilai negara Indonesia masih bisa bertahan meskipun dibagi menjadi sampai 50 provinsi ('50 Provinsi, Realistiskah?', *Kompas Online*, 7 Februari 2000). Ryaas Rayid juga setuju bahwa 'perlu ada pemekaran wilayah' karena jumlah provinsi di Indonesia sampai saat ini tidak menguntungkan rakyat di banyak lokasi ('Bila Keran Kebebasan Dibuka Terbentuk 100 Provinsi', *Kompas Online*, 11 Februari 2000). Dari pandangan nasional, mungkin memang betul Indonesia bisa dibagi seperti yang disarankan. Akan tetapi, bagaimana keadaan di Provinsi Sulawesi Selatan yang berpenduduk kurang dari delapan juta orang kalau

dibagi menurut rencana gerakan-gerakan provinsi baru yang sedang aktif di daerah itu?

Usulan untuk membentuk provinsi tersendiri muncul dalam tujuh belas kabupaten dan kotamadya dari sejumlah dua puluh empat yang sejak 1999 ada di Sulawesi Selatan. Daerah-daerah yang menghendaki dilepaskan dari provinsi induk adalah, pertama, Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polmas (Polewali-Mamasa), disebut sebagai wilayah Mandar, yang ingin membentuk Provinsi Sulawesi Barat. Yang kedua, Kabupaten Luwu dan Luwu Utara yang mau bergabung sebagai Provinsi Luwu Raya. Kedua permohonan membentuk Provinsi Sulawesi Barat dan Luwu Raya ini sedang dikaji dan dibahas DPR sesuai dengan rekomendasi DPRD I dan II. Selain kedua gerakan yang utama itu, pada bulan Februari 2001 pembentukan provinsi baru Sulawesi Timur diusulkan untuk menggabungkan enam kabupaten yang terletak ke arah timur dari Makassar, yaitu Bone, Soppeng, Wajo, Bulukumba, Sinjai dan Selayar. Setelah itu, beberapa minggu kemudian pada awal bulan Maret muncul komentar dari Bupati Pinrang bahwa sebuah Provinsi Ajatappareng bisa terwujud dari Kabupaten Pinrang, Sidrap, Barru dan Enrekang serta Kotamadya Parepare sebagai ibu kota. Namun, kedua usulan terakhir itu, ternyata tidak begitu serius, dan mungkin hanya merupakan reaksi terhadap tuntutan yang lain serta kekhawatiran mengenai masa depan kalau Provinsi Sulawesi Selatan diperlemah. Seperti Bupati Pinrang berkata, kalau terjadi pembentukan provinsi baru Sulbar, Luwu Raya dan Sultim, 'maka mau tak mau munculnya Provinsi Ajatappareng dipastikan tak akan mampu dibendung' ('Bupati Pinrang Wacanakan Prov Ajatappareng', *Fajar Online* 10 Maret 2001).

Keinginan perubahan pemerintahan tidak hanya muncul di tingkat provinsi. Ada juga kehendak dan upaya-upaya untuk pembentukan kabupaten-kabupaten yang baru. Misalnya, sampai tahun 1999, wilayah Luwu Raya yang direncanakan hanya terdiri atas satu kabupaten yang luas sekali, yakni Luwu. Dalam upaya menanggulangi kerusuhan-kerusuhan yang bersifat konflik etnis di daerah ini Kabupaten Luwu dipisahkan menjadi dua, Luwu dan Luwu Utara. Sejak pembagian itu, sudah muncul tuntutan yang baru untuk membentuk Kabupaten Luwu Timur didalam wilayah Luwu Utara. Wilayah Luwu Timur ini mencakup perusahaan pertambangan yang paling besar di Sulawesi Selatan, dikelola PT Inco di Soroako. Pada bulan Februari 2001, DPRD Luwu Utara menyepakati pemekaran kabupaten tersebut supaya Luwu Timur bisa diwujudkan ('DPRD Lutra Sepakati Pembentukan Lutim', *Fajar Online* 5 Februari 2001). Namun, empat bulan kemudian, Bupati Luwu Utara dituduh mengingkari kesepakatan DPRD itu. Hal ini mengakibatkan protes dari Panitia Persiapan Pembentukan Luwu Timur yang menuntut pembentukan pemerintahan sementara untuk segera melepaskan wilayah itu dari Kabupaten Luwu Utara ('Warga Malili Desak Pembentukan Luwu Timur', *Fajar Online*, 13 Juni 2001). Selain itu, juga di dalam wilayah Luwu Raya, ibu kota bekas Kabupaten Luwu, Palopo, dianjurkan oleh masyarakat sebagai kota otonom.

Perubahan di tingkat kabupaten juga terjadi di wilayah Sulawesi Barat. Masyarakat Mamasa sedang mendesak pemisahan dari Kabupaten Polmas, yang terdiri atas wilayah pantai Polewali dan wilayah pegunungan Mamasa. Permohonan pemisahan

ini sudah disetujui DPRD I dan II, serta dikaji oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Depdagri dan Otda. Kebanyakan penduduk daerah Mamasa beretnis Toraja, walaupun sampai saat ini, belum jelas apakah masyarakat Mamasa ini berkeinginan bergabung dengan provinsi baru Sulawesi Barat atau Luwu Raya (kalau jadi) atau tetap menjadi bagian dari Sulawesi Selatan.

Di Antara Dua Provinsi Baru

Kedua provinsi baru ini, yaitu Sulawesi Barat dan Luwu Raya masing-masing terletak di pantai barat dan timur, dan memanjang ke pegunungan di mana berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja. Kabupaten ini meliputi daerah Sa'dan Toraja yang merupakan tujuan wisata yang terbesar di Sulawesi Selatan, serta salah satu wilayah pariwisata yang terkenal di Indonesia dan di dunia luar. Pada awal proses pembicaraan terbentuknya Provinsi Luwu Raya, Kabupaten Tana Toraja direncanakan tergabung dengan Luwu dan Luwu Utara untuk menjadi provinsi tersebut. Namun demikian, sejak bulan Februari 2001, diputuskan oleh Komite Pusat Pembentukan Provinsi Luwu Raya bahwa daerah Toraja itu tidak akan termasuk. Menurut Ketua Komite tersebut, Luwu Raya hanya akan meliputi daerah bekas kewedanaan yang tidak pernah termasuk wilayah Toraja. Keputusan untuk menolak partisipasi Tana Toraja ini dipengaruhi kelompok Kerukunan Keluarga Luwu ('Pendepakan Tator, Pengingkaran Sejarah,' *Fajar Online* 7 Maret 2001). Penolakannya dan alasan ini dipertanyakan pihak Toraja, dan juga sebagian masyarakat Luwu, yang menunjukkan kaitan historis antara kedua daerah itu. Apalagi, banyak orang Toraja berdiam dan bekerja di daerah Luwu. Akan tetapi, harus diakui hubungan antara kedua daerah tersebut sering ambivalen dan berbau pertentangan etnis, agama, dan kebudayaan. Oleh karena itu, harapan kerja sama antara kedua pihak secara berimbang dan harmonis kelihatannya tidak menentu. Salah satu contoh ketegangan ini adalah penolakan dari Luwu Raya yang mengakibatkan lagi perasaan saling curiga serta memunculkan pengaduan '*hidden agenda*', atau kekurangan transparansi dalam negosiasi. Dari pandangan sosio-ekonomi, keputusan untuk mengeluarkan Tana Toraja itu sulit untuk dipahami. Meskipun jumlah pendapatan daerah Luwu lebih tinggi daripada Tana Toraja, pendapatan *per-capita* di Toraja lebih tinggi daripada Luwu (lihat Table 1). Bisa dibayangkan juga bahwa pendapatan sektor pariwisata Toraja mampu menguntungkan Provinsi Luwu Raya. Oleh karena itu, kelihatannya ada kemungkinan penolakan itu beralasan persaingan etnis atau hegemoni. Misalnya, sebagai daerah pegunungan, Kabupaten Tana Toraja tidak mempunyai fasilitas pelabuhan sehingga tetap bergantung pada fasilitas yang berada di Kabupaten Luwu 60 kilometer ke arah timur, atau yang lebih jauh lagi, 300 kilometer ke arah selatan di Makassar. Karena hak pengelolaan fasilitas pelabuhan akhir-akhir ini diserahkan kepada pemerintah lokal, situasi itu nanti bisa dimanfaatkan Provinsi Luwu Raya melalui pajak pelabuhan.

Sifat-sifat etnis, terutama identitas budaya, juga tampil dalam proses sosialisasi konsep-konsep provinsi baru. Pembentukan struktur pemerintahan baru ini tidak hanya berdasarkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, tetapi juga kadang-kadang berbau etnosentrisme. Setelah suatu seminar budaya di Kabupaten Luwu, yang diadakan pada bulan Januari 2001 untuk menyambut otonomi daerah, salah seorang pemimpin LSM mengungkapkan kepada saya keprihatinannya bahwa

pengangkatan nilai-nilai budaya dan sejarah lokal bisa bersifat propaganda kalau tidak mempedulikan hak-hak masyarakat lain. Walaupun peningkatan kepercayaan diri di daerah-daerah sangat penting sebagai sarana membangun partisipasi masyarakat, kemungkinan etnosentrisme harus diperhatikan. Dalam wacana provinsi baru istilah-istilah yang lebih sering terdengar adalah 'keinginan kemandirian' dan 'untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat'. Namun secara pribadi, sebagai gambaran, tokoh dan rakyat Mandar mengakui ada juga alasan etnis. Suku bangsa Mandar itu merasa tertimbu di bawah etnis Bugis dan Makassar sehingga sejarah, kebudayaan, serta sifat Mandar sudah agak hilang. Banyak orang di luar Sulawesi Selatan sudah tahu orang Bugis, Makassar, dan Toraja, tetapi orang Mandar sering dianggap hanya sebagai bagian dari kelompok orang Bugis. Secara umum, unsur etnis ini tidak diakui dalam perdebatan provinsi baru. Misalnya walaupun kebudayaan etnis dan identitas lokal sempat diperkuat oleh pembentukan provinsi tersendiri, kemunculan ketegangan etnis di dalam wilayah Sulawesi Barat yang terencana sengaja dihindari. Karena itu, nama Mandar tidak terpilih sebagai nama provinsi baru dan Sulawesi Barat dianggap lebih layak di wilayah ini yang sudah didiami banyak suku bangsa baik dari Sulawesi maupun di luar pulau itu (Danial 2001a).

Alasan sejarah yang diangkat dalam penolakan Tana Toraja itu merupakan salah satu alat negosiasi yang sering dipergunakan dalam proses sosialisasi. Perwujudan pemerintahan daerah masing-masing pada masa dahulu sering diangkat sebagai ideal atau teladan yang sangat bermanfaat kalau bisa tercapai lagi. Di Luwu, masyarakat sering diingatkan sejarah lokal sebagai kerajaan yang pertama di wilayah Sulawesi Selatan (Andaya 1981:19), diceritakan dalam epos I La Galigo yang terkenal. Di pantai barat juga, tuntutan membentuk Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya muncul dari keinginan perubahan politik pada era reformasi yang modern ini. Wilayah ketiga kabupaten ini merupakan wilayah Mandar yaitu *homelands*, atau tanah, kelompok etnis Mandar. Sebelum ekspansi pemerintah penjajahan wilayah Mandar ini diperintah oleh tujuh kerajaan yang terletak di pegunungan (disebut sebagai *Pitu Uhunna Salu*, atau tujuh hulu sungai), dan tujuh kerajaan di daerah pantai (*Pitu Babana Binanga*, atau tujuh muara sungai). Daerah *Pitu Uhunna Salu* itu merupakan daerah yang sedang direncanakan menjadi Kabupaten Mamasa. Pada zaman Belanda, kerajaan-kerajaan ini terkumpul menjadi salah satu *afdeling* yang dikuasai pemerintah kolonial. Kemudian pada waktu perjuangan kemerdekaan, terutama pada periode pemerintahan Negara Indonesia Timur di antara tahun 1947-1950, harapan untuk menjadi satu provinsi tersendiri dikemukakan oleh tokoh Mandar. Pada tahun 1964, kemauan kemandirian muncul lagi, walaupun tidak berhasil (Danial 2001a). Upaya-upaya tersebut belakangan ini mulai lagi pada tahun 1994. Kemudian, kebijaksanaan otonomi daerah memberikan peluang baru yang mendorong lagi terbentuknya provinsi itu.

Meningkatkan ekonomi dan peranan lokal

Motivasi untuk memekarkan diri timbul dari perasaan terabaikan oleh pemerintah provinsi yang terletak ratusan kilometre ke arah selatan di kota Makassar. Dengan menuntut pemerintahan yang akan lebih memahami dan memperhatikan persoalan dan keadaan lokal, penduduk di daerah Sulawesi Barat dan Luwu Raya ini melawan sentralisme yang terjadi di tingkat provinsi dan kabupaten. Di Sulawesi Selatan sejak

era perjuangan kemerdekaan penduduk sering mendesak desentralisasi atau melawan sifat dan perbuatan sentralisme di tingkat nasional. Pada tahun 1947 kota Makassar menjadi ibu kota federasi Negara Indonesia Timur, namun kehilangan posisi ini ketika NIT itu dibubarkan. Kemudian, perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap struktur pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1957 mengakibatkan salah satu faktor penyebab perang Darul Islam yang dipimpin Kahar Muzakkar. Menurut analisis Barbara Harvey, perang ini muncul dari penolakan para pejuang Sulawesi Selatan yang tidak diangkat oleh pemerintah pusat sebagai pejabat dan pemimpin militer (Harvey 1974: 430-35). Belakangan ini pendukung BJ Habibie pada waktu Pemilu 1999 bisa juga dianggap tindakan anti-sentralisme. Demikian pula perasaan kekecewaan yang muncul dengan protes Sulawesi Merdeka setelah penolakan Laporan Pertanggungjawaban Habibie pada bulan Oktober 1999.

Namun perlawanan yang muncul dalam era Otonomi ini lebih menghadapi sentralisme lokal daripada pusat. Upaya-upaya untuk memisahkan dari provinsi induk memperlihatkan kemauan kemandirian dengan cara memanfaatkan potensi wilayahnya yang dianggap belum terealisasi. Perasaan keterpinggiran ditemukan dalam dua bidang yang pokok, yaitu perkembangan ekonomi-sosial dan perasaan terabaikan yang dialami masyarakat setempat. Terutama tokoh masyarakat yang pernah memiliki peran sosial yang dikurangi pemerintah provinsi dan nasional, pada saat ini menuntut kekuasaan mereka dikembalikan.

Guna memutuskan pembentukan provinsi baru, kriteria yang akan dipertimbangkan DPR dan Dewan-Dewan yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, adalah kemauan masyarakat di tempat masing-masing, jumlah penduduk dan sumber daya manusia, keberadaan wilayah yang memadai serta sumber daya alam ('50 Provinsi, Realistiskah?', *Kompas Online*, 7 Februari 2000). Tidak semua penduduk mendorong pembentukan provinsi baru masing-masing. Di seluruh Sulawesi Selatan, termasuk di daerah provinsi-provinsi baru yang diusulkan, terdengar keraguan terhadap kemampuan wilayah-wilayah ini untuk berhasil sebagai provinsi tersendiri. Terutama di Kabupaten Majene, Mamuju dan Polmas, Pendapatan Asli Daerah sampai saat ini masih kurang untuk membiayai aparat pemerintahan pun, apalagi mengembangkan masyarakat setempat. Pada umumnya, tiga kabupaten ini bergantung pada subsidi pemerintah sebanyak 60 sampai 70 persen ('Potensi tak Perlu Diragukan', *Harian Fajar Online*, 11 April 2001). Menurut daftar Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Selatan pada tahun 1998 (Tabel 1) ketiga kabupaten ini termasuk yang paling miskin di Provinsi tersebut. Kalau begitu, bagaimana bisa bertahan dan berkembang sebagai provinsi tersendiri?

Table 1
Composition of regencies in South Sulawesi on the basis of regional revenue in the 1998/1999 budget

| Kabupaten/ Kotamadya | Jumlah Desa | Luas Km2 | Jumlah Penduduk | Pendapatan Daerah (dalam ribu rupiah) |
|---------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|--|
| Makassar | 142 | 199,49 | 1.252.493 | 25.183.686 |
| Gowa | 130 | 1.883,33 | 479.401 | 7.451.637 |
| Pangkep | 97 | 1.112,29 | 265.754 | 5.102.982 |
| Luwu * | 413 | 17.791,42 | 799.715 | 4.642.784 |
| Bone | 372 | 4.559,00 | 629.794 | 4.016.905 |
| Parepare | 13 | 99,33 | 103.536 | 3.562.323 |
| Wajo | 148 | 2.506,19 | 405.875 | 3.345.464 |
| Sidenreng Rappang | 66 | 1.883,25 | 241.439 | 2.847.766 |
| Maros | 98 | 1.619,12 | 251.172 | 2.672.581 |
| Bulukumba | 114 | 1.154,67 | 347.338 | 2.524.520 |
| Tana Toraja | 113 | 3.205,77 | 381.260 | 2.684.498 |
| Soppeng | 66 | 1.500,00 | 233.358 | 2.066.481 |
| Sinjai | 68 | 819,96 | 200.905 | 2.021.856 |
| Polewali Mamasa | 168 | 4.781,53 | 435.795 | 1.825.573 |
| Mamuju | 75 | 11.057,81 | 283.381 | 1.750.306 |
| Pinrang | 103 | 1.961,77 | 307.637 | 1.645.166 |
| Bantaeng | 42 | 395,83 | 151.450 | 1.553.400 |
| Takalar | 73 | 560,86 | 219.693 | 1.236.084 |
| Barru | 54 | 1.174,72 | 151.509 | 1.225.364 |
| Enrekang | 49 | 1.786,01 | 160.731 | 1.076.580 |
| Jeneponto | 111 | 737,64 | 309.968 | 982.316 |
| Majene | 29 | 947,84 | 135.784 | 773.440 |
| Selayar | 38 | 903,35 | 101.226 | 614.836 |
| Jumlah | 2.582 | 62.641,18 | 7.849.214 | 80.806.548 |

Source: Sulawesi Selatan Dalam Angka 1998.
 Central Bureau of Statistics - Financial Statistics of Regencies, 1997-99 (Adapted from 'Small lords and new KKN looming in Pangkep', *The Jakarta Post Online*, Thursday, December 21, 2000. <http://www.thejakartapost.com>)

Note* Pada tahun 1999 Kabupaten Luwu dibagi menjadi dua kabupaten - Luwu dan Luwu Utara.

Meskipun PADnya sampai saat ini belum memadai, para pendukung pembentukan Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan. Antara lain, peluang untuk ekspansi pertanian dan perkebunan komoditas kakao, cengkeh, kopi, serta kelapa. Dari luas wilayah 16.787,18 Km persegi di tiga kabupaten wilayah Mandar, baru 133.000 Ha sudah dikembangkan sebagai areal perkebunan. Komoditas utama lain termasuk 95.000 Ha persawahan yang mampu memproduksi lebih dari 452.000 ton padi setiap panen. Kedua daerah Mandar dan Luwu (Mandarlu) sedang direncanakan sebagai wilayah perkebunan kakao yang terpenting untuk masa depan Sulawesi Selatan, provinsi yang sudah memproduksi 70 persen dari semua kakao di Indonesia. Belakangan ini perkebunan kopi mulai berkembang di Luwu dan Mamasa, termasuk yang berorientasi ekspor. Industri kehutanan di kedua wilayah ini selama dua puluh sampai tiga puluh tahun terakhir, menjadi andalan yang juga dianggap berpotensi besar untuk dieksploitasi lebih lanjut. Pendapatan dari sektor kehutanan ini sudah lama diperoleh provinsi induk. Selain itu, produksi perikanan di wilayah Mandar yang melebihi 60.000 ton pada tahun 1999 dianggap sangat berpotensi karena panjangnya pantai yang mencapai hampir 600 kilometer ('Potensinya tak Perlu Diragukan', *Fajar Online*, 11 April 2001).

Walaupun harga-harga komoditas ini lonjak-anjlok akibat berbagai faktor, dampak krisis ekonomi tidak terlalu terasa di wilayah Sulawesi Selatan dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia (Potter 2000:240). Harga kebanyakan komoditas yang diproduksi di Provinsi ini pada umumnya tetap tinggi, dan pendapatannya meningkat karena komoditas seperti kakao dan kopi diperdagangkan dengan harga Dolar US. Di wilayah Luwu Raya komoditas ekspor ini termasuk nikel yang ditambang PT Inco di Soroako. Rencana untuk masa depan di wilayah ini berdasarkan peningkatan pendapatan dari pertambangan itu. Justru karena peluang itu pembentukan Kabupaten Luwu Timur didesak masyarakat setempat. Justru karena itu juga, kabupaten induk Luwu Utara, enggan melepaskan daerah yang diminta. Meskipun keberadaan perusahaan tambang nikel itu memunculkan banyak persoalan baik sosial maupun lingkungan (Moody 1999; Robinson 1999), dana royalti serta peluang pekerjaan sangat diinginkan.

Bagaimana dampaknya pemisahan?

Kalau kedua provinsi baru diperbolehkan terbentuk, Provinsi Sulawesi Selatan akan kehilangan kurang lebih 55 persen dari luas arealnya, serta penduduk sebanyak lebih 1,654 juta orang, atau 21 persen dari jumlah penduduk saat ini. Menurut angka-angka dari tahun 1998-99 (lihat Table 1) hanya 12 persen dari jumlah PAD akan hilang. Kalau begitu, implikasinya untuk ekonomi Sulawesi Selatan kelihatannya tidak terlalu memprihatinkan. Namun yang penting bukan situasi masa kini melainkan potensi perkembangan pada masa depan. Walaupun PAD di wilayah Sulawesi Barat dan Luwu Timur - terutama Sulawesi Barat - belum tinggi, di kedua daerah ini potensi untuk berkembang jelas tinggi. Setiap daerah memiliki wilayah yang luas dan belum dimanfaatkan, dan walaupun jauh dari kota Makassar, setiap wilayah memiliki fasilitas pelabuhan untuk transportasi komoditas ekspor. Industri perikanan di Sulawesi Barat misalnya belum begitu diperkembangkan, sementara yang berada di sekitar Makassar dan pantai selatan sudah berkurang akibat 'over-fishing'.

Salah satu faktor yang nyata, pemerintah Sulawesi Selatan tidak mau melepaskan perusahaan PT Inco ke wilayah lain. Pada tahun 2001 ini diharapkan pendapatan royalti dari PT Inco akan mencapai Rp 9,8 Milyar karena ekspansi fasilitas dan produksi perusahaan itu ('Royalti Inco Ditarget Rp 9,8 M', *Fajar Online*, 24 Februari 2001). Walaupun sampai 60 persen dari pendapatan itu dikembalikan ke Kabupaten Luwu Utara, sisanya sangat menguntungkan provinsi induk. Tahun-tahun sebelumnya pendapatan royalti ini lebih rendah karena harga nikel berfluktuasi dan persentase keuntungan yang disebarkan PT Inco juga rendah. Namun demikian, kontribusi PT Inco dalam bentuk royalti dan pajak akhir-akhir ini ditingkatkan setelah dinegosiasikan kembali dalam rangka otonomi daerah.

Pemisahan wilayah ini jelas memiliki implikasi ekonomi, serta implikasi lingkungan. Implikasi ekonomi mencakup kebutuhan membiayai gaji serta infrastruktur aparat pemerintahan di provinsi-provinsi baru. Sesuai dengan rencana masing-masing panitia membentuk provinsi baru, pendapatan akan diterima dengan memperluas dan mengintensifikan sektor perkebunan, pertambangan, penebangan kayu, dan perikanan yang berskala besar. Walaupun potensi sumberdaya alam tidak perlu dipertanyakan, potensi ini hanya bisa direalisasi dengan tingkat dana dan teknologi yang cukup tinggi. Karena itu, semua kegiatan ini akan menguntungkan pengusaha besar yang memiliki dana atau bisa akses pinjaman bank, serta pengetahuan 'business practice'. Maka, partisipasi nelayan dan petani kecil akan terhalangi karena belum sempat memiliki dana atau kemampuan. Di Sulawesi Selatan lebih 50 persen rumah tangga petani menguasai lahan kurang dari 0,5 Ha, dan pada umumnya, bukan masyarakat kecil yang beruntung dari ekspansi pertanian dan perkebunan (Potter 2000:242).

Sudah terbukti bahwa intensifikasi sektor-sektor tersebut bisa merugikan lingkungan alam melalui erosi tanah, kebakaran hutan, dampak pestisida, dsb. Namun, seperti ditunjukkan Sarwono Kusumaatmadja, ada kepercayaan umum bahwa:

the exploitation of natural resources provides a solution for an economy hard pressed by unemployment and by the need for revenue generation. In times of crisis, it is natural that decision makers would turn to short-term solutions without considering the longer-term and intractable problems that may result. (Kusumatmaadja 2000:211).

Misalnya, dalam mendukung pembentukan Provinsi Sulawesi Barat Mantan Menko Kesra dan Taskin Prof Dr H Basri Hasanuddin, menunjukkan bahwa selama ini 'potensi dan peluang besar yang ada di daerah ini terabaikan dan tidak dapat diangkat' ('Provinsi Sulbar Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat', *Kompas Online* 23 Januari 2001). Eksploitasi sumber daya alam sudah menimbulkan sengketa tanah dan protes massa di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, serta kasus lahan hutan lindung yang diklaim Dinas Perkebunan.¹ Selain itu, walaupun sejak reformasi pemimpin perusahaan PT Inco lebih memperhatikan ketidakpuasan dan kemauan rakyat Soroako akibat tuntutan rakyat setempat, persoalan lingkungan dan sosial akan meningkat

¹Diantara banyak artikel pers lihat sebagai contoh 'Pengusaha Kecil Protes Inhutani Mamuju', *Harian Fajar*, 31 Januari 2001:16; 'Warga Mengadu ke DPRD' *Fajar Online*, 23 Mei 2001; 'Ekspor Kopi Arabika Diperkirakan Naik', *Fajar Online*, 13 Juni 2001; 'Dishut-Disbun Barru Saling Klaim', *Fajar Online*, 16 Juni 2001.

dengan ekspansi PT Inco yang sudah direncanakan (Moody 1999:22). Penembangan kayu liar juga sudah muncul sebagai masalah besar yang dipersulit karena luasnya daerah, kekurangan penduduknya, serta kegiatan dan data sektor kehutanan yang tidak menentu. Misalnya, menurut statistik kehutanan, pada tahun 1997-99 hanya sembilan Hak Pengusahaan Hutan dikeluarkan di seluruh Sulawesi Selatan, dengan areal kurang lebih 600.000 hektare (Badan Pusat Statistik 1999). Namun, menurut sumber lain, setidaknya 12 HPH dikeluarkan di Kabupaten Mamuju sendiri (Danial 2001b). Lagi pula, seperti pernah digambarkan di Kabupaten Luwu, industri ini sangat berbau KKN dan sulit dikontrol (Hamid 1999).

Di seluruh Sulawesi Selatan, peningkatan areal perkebunan dianjurkan sebagai sarana mengatasi kekurangan dan ketidakefisiensi ekonomi. Mungkin dengan mengingat sistem pertanian di Malaysia yang lebih berorientasi perkebunan daripada persawahan, usahawan asal Sulawesi, yang juga mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan HM Jusuf Kalla, menyarankan agar petani setempat 'beralih ke usaha tambak udang dan perkebunan kopi, lada dan coklat' ('Rakyat Tunggu Bukti dan Janji', *Kompas Online* 6 Nopember 2000). Walaupun Sulawesi Selatan terkenal sebagai lumbung padi, sektor pertanian ini tidak bisa meningkatkan kemakmuran secara luas karena harga beras - sebagai bahan pokok - bisa dimanipulasi pemerintah.

Kesimpulan

Semua pemimpin gerakan-gerakan membentuk provinsi dan kabupaten baru ini jarang menyebutkan istilah 'perpisahan' dalam wacana mereka. Kebanyakan masyarakat Sulawesi Selatan tidak berniat mengancam stabilitas negeri Indonesia, dan tidak ingin lepas dari negara Indonesia. Namun tuntutan ini mengungkapkan ketidakpuasan masyarakat dengan sistem pemerintahan yang bersifat sentralis dan yang mengabaikan masyarakat jauh dari pusat, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Andi Mallarangeng berpendapat gerakan membentuk Provinsi Sulawesi Barat tidak begitu didorong masyarakat, melainkan memunculkan dari emosi ('50 Provinsis, Realistiskah?', *Kompas Online*, 7 Februari 2000). Namun demikian, apakah dimanipulasi tokoh masyarakat atau tidak, dan apakah provinsi-provinsi baru akan diadakan atau tidak, pelajaran yang harus diangkat oleh pemerintah adalah isu-isu daerah harus diperhatikan dengan teliti. Meskipun pemekaran daerah tidak akan menjamin kesejahteraan, perasaan keterpinggiran harus diingat supaya ketidakadilan tidak dilanjutkan sehingga menimbulkan persoalan-persoalan yang bisa berlangsung lama.

Bibliography

- Andaya, Leonard Y 1981, *The Heritage of Arung Palakka. A history of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century*, Martinus Nijhoff, The Hague.
- Badan Pusat Statistik, 'Forest Concession Estates by Province and Area, 1997-1999.
<http://www.bps.go.id/statbysector/agri/hutan/table1.shtml>
- Danial, M. 2001a, 'Antara Pesimis dan Kenyataan', *Fajar Online*, 10 April.
2001b, 'Potensinya tak Perlu Diragukan', *Fajar Online*, 11 April.
- Hamid, Hasanuddin 1999, 'Jaring-Jaring Perambah Hutan di Luwu', in Arifuddin Saeni (ed) *Praktik KKN di Sulsel*, eSIM, Makassar, pp. 47-53.
- Harvey, Barbara Sillars 1974, *Tradition, Islam and Rebellion in South Sulawesi 1950 - 1965*, PhD Thesis Cornell University.
- Kusumatmaadja, Sarwono 2000, 'Through the Crisis and Beyond: The Evolution of the Environment Movement', in Chris Manning and Peter van Dierman (eds), *Indonesia in Transition. Social Aspects of Reformasi and Crisis*, ISEAS, Singapore, pp. 205-212.
- Moody, Roger 1999, 'Dirty Landlord', *Inside Indonesia* 60, pp 22-3.
- Potter, Lesley 2000, 'Rural Livelihoods and the Environment at a Time of Uncertainty: The Situation Outside Java', in Chris Manning and Peter van Dierman (eds), *Indonesia in Transition. Social Aspects of Reformasi and Crisis*, ISEAS, Singapore, pp. 239-252.
- Robinson, Kathryn 1999, 'Revisiting Inco', *Inside Indonesia* 60, p. 24.